

## GENEOLOGI SEGREGASI PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN

Dyah Nawangsari

*Prodi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember*

### Abstract

*Segregation is a characteristic pattern of the education system of pesantren. It's "compulsory" for every pesantren to implement segregation system. So, segregation system could be seen at all pesantrens, including Pesantren as-Sunniah Kencong Jember. This research treats the phenomenon of segregation in Pesantren as-Sunniah as an object of study. The questions are: what are the backgrounds of thought?, what are the forms of the segregation?, and how is the impact of the segregation system?*

*Applying reflexive mode of thinking as the frame of analysis, the research arrives at the conclusions: 1, the backgrounds of thought of the segregation system at Pesantren as-Sunniah Kencong Jember are a, normative demand, b, defending identity, c, keeping the purity of heart, and d, skill differences; 2, the segregation of the education system appears in the learning process that is physically separated, at the teachers' selection, and at the curriculum; 3, the positive impacts of the segregation system are much more than the negative ones.*

**Kata Kunci:** Geneologi, Segregasi, Pendidikan Pondok Pesantren

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pemenuhannya. Tidak diragukan lagi bahwa pendidikan bukan sekedar pemenuhan hak dan kebutuhan untuk bersekolah. Lebih dari itu, pendidikan merupakan wahana untuk proses sosialisasi berbagai pengetahuan dan perkembangan pengetahuan manusia itu sendiri. Selain itu, pendidikan merupakan sarana untuk melahirkan individu-individu yang berkualitas, sehingga mampu beradaptasi dengan situasi zaman yang senantiasa berubah. Qardhawi (1980: 157) menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha untuk menyiapkan manusia agar dapat hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dalam segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan

pahitnya, senang dan getirnya.

Islam sejak awal menegaskan perlunya pendidikan bagi manusia. Ayat pertama yang turun, Surat Al 'Alaq (ayat 1-5), seakan menegaskan bahwa *iqra'* (membaca) merupakan perintah yang pertama kali turun sebelum perintah-perintah lain. Ini berarti bahwa pendidikan merupakan pilar yang paling utama dan sebagai bekal yang paling mendasar untuk memahami dan mendalami, untuk selanjutnya mengamalkan, perintah-perintah yang lain. Dalam beberapa ayat Al Qur'an, ditegaskan tentang pentingnya pendidikan dan keutamaan menuntut ilmu. Di antara beberapa ayat tersebut adalah ayat 43 surat an-Nahl, yang artinya:

Katakan (Hai Muhammad) 'Adakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran (Depag RI, 1989: 747).

Juga, ayat 11 surat Al-Mujadalah, yang artinya:

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat (Depag RI, 1989: 911).

Begitu pentingnya pendidikan bagi manusia sehingga Islam mewajibkan umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu. Dalam salah satu Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abd al Barr dari Anas r.a., Nabi saw bersabda, "Menuntut ilmu pengetahuan itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan" (As-Suyuthi, tt: 53). Hadits tersebut menegaskan bahwa Islam mewajibkan menuntut ilmu bagi segenap pengikutnya. Dengan demikian, pendidikan bukan sekedar hak, melainkan merupakan kewajiban bagi setiap muslim, tanpa memandang status sosial, ras, warna kulit, maupun jenis kelamin (Soebahar, 2002: 77).

Gambaran masyarakat muslim kurun awal semakin menegaskan prinsip egalitarian Islam dalam hal menuntut ilmu. Secara umum, masyarakat muslim kurun awal menunjukkan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu pengetahuan. Rasulullah memberikan perhatian yang sama besar bagi pengikutnya dalam menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam salah satu riwayat dikisahkan bahwa beberapa perempuan pernah mengadu kepada Rasulullah perihal keunggulan kaum pria dalam pelajaran Al Qur'an dikarenakan kaum pria memiliki waktu yang relatif lebih banyak dalam belajar karena tidak dibebani urusan rumah tangga yang notebene menjadi tanggung jawab perempuan. Selanjutnya mereka mengajukan usul kepada Nabi

untuk memberikan waktu tambahan untuk mengajar kaum perempuan agar bisa menyamai pengetahuan yang dimiliki kaum laki-laki. Rasul pun mengabulkan permohonan mereka (Abbot, dalam Ahmed, 2000: 88).

Walaupun Islam menegaskan tentang hak —bahkan kewajiban— bagi siapa pun untuk menempuh pendidikan tanpa ada diskriminasi, dalam kenyataan, masih ada pihak-pihak yang diposisikan lemah, dan paling banyak terhambat dalam memperoleh pendidikan. Perempuan misalnya, karena posisi sosialnya dilemahkan, memperoleh kesempatan yang relatif lebih terbatas dibandingkan dengan laki-laki, meskipun sebenarnya jumlah perempuan sedikit lebih banyak dari pada laki-laki. Data BPS (Badan Pusat Statistik) mulai tahun 1980-1990 menunjukkan bahwa angka rata-rata perempuan yang masuk ke lembaga pendidikan lebih kecil jika dibandingkan dengan angka masuk laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil angka rata-rata masuk perempuan. Di tingkat SD, perbandingan perempuan dengan laki-laki adalah 49.18% : 50.83%; di tingkat SMP, 46.34% : 53.56%; di tingkat SMA, 41.45% : 58.57%; dan di tingkat perguruan tinggi, 33.60% : 66,40%. Tentu saja untuk tingkat yang lebih tinggi kesempatan perempuan akan jauh lebih sedikit (Jurnal Perempuan, no. 23, 2002: 7-16).

Rendahnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi perempuan merupakan akibat dari masih dominannya perspektif dalam masyarakat yang memandang perempuan harus cepat bersuami sehingga menjadi penghambat keinginannya untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kesempatan yang lebih kecil ini merupakan salah satu ketimpangan pendidikan bagi perempuan. Ketimpangan lainnya adalah segregasi (pemisahan) pendidikan yang sering menistakan perempuan, stereotype yang menempatkan perempuan hanya untuk jenis pendidikan tertentu, dan yang lebih parah, kurikulum atau materi pendidikan yang masih melestarikan ketidakadilan bagi perempuan.

Segregasi pendidikan —dalam segala bentuk— sesungguhnya lebih banyak dilatarbelakangi oleh persoalan masih adanya penafsiran bahwa Islam membatasi hak pendidikan bagi perempuan. Di samping itu, didukung adanya citra bagi perempuan yang dianggap menyesatkan dan sebagai teman (agen) iblis. Anehnya, pandangan tersebut, mendapatkan legitimasi dari beberapa hadits yang semakin memperburuk citra perempuan. Di antaranya, hadits yang dipilih An-Nawawi (tanpa menyertakan perawinya), “Perempuan adalah perangkap setan. Andaikata tidak terdapat syahwat niscaya wanita itu tidak dapat menguasai lelaki”. Hadits lain (yang juga di ambil tanpa menyertakan perawinya):

Wanita adalah aurat. Maka jika ia keluar dari rumahnya, ia diawasi setan, dan wanita yang paling dekat kepada Allah adalah apabila wanita berada di rumahnya.

Agama, atau lebih tepatnya, pemaknaan terhadap agama, sebagai salah satu unsur paling utama dari kultur masyarakat, sangat bertanggung jawab dalam mendorong terjadinya segregasi dalam pendidikan. Teks-teks hadits sebagaimana disebutkan di atas, serta beberapa teks sejenis, akan banyak menghambat perempuan untuk memperoleh pendidikan dan pengetahuan. Seperti anjuran perempuan untuk lebih banyak tinggal di rumah supaya tidak terlibat dalam aktifitas masjid—sekalipun untuk keperluan shalat—berarti merupakan bentuk penghambatan terhadap perempuan untuk memperoleh pengetahuan, pendidikan, dan informasi. Ini dikarenakan, bagi umat Islam, masjid adalah pusat pengetahuan dan pendidikan, di samping sarana untuk ibadah ritual. Teks hadits yang mengandung anjuran agar perempuan lebih banyak tinggal di rumah supaya tidak terlibat dalam aktifitas masjid, sebagaimana diriwayatkan oleh Baihaqi dari Aisyah r.a, sebagai berikut:

Sungguh shalat seorang perempuan di rumah lebih baik baginya dari pada shalat di kamarnya, dan sesungguhnya shalat perempuan di kamarnya lebih baik dari pada shalat perempuan di pekarangan rumahnya, dan shalat perempuan di pekarangan rumahnya lebih baik dari pada shalat perempuan di masjid (Suyuthi, tt: 133).

Pandangan stereotype tentang perempuan yang mendapat justifikasi dari beberapa teks hadits inilah yang tampaknya menjadi faktor pendorong utama penyelenggaraan pendidikan yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Pondok pesantren sebagai lembaga pencetak ulama (ahli agama) tampaknya memiliki kecenderungan untuk mengambil bentuk pendidikan yang terpisah ini. Pada banyak (baca: semua) pesantren, santri laki-laki dan perempuan ditempatkan dalam lokasi yang terpisah. Di samping itu, pembelajaran yang dilakukan tidak melalui co-edukasi (bergabung atau bersama-sama). Beberapa pesantren bahkan mewajibkan pemasangan hijab (kain penutup) apabila seorang kyai harus mengajar santri perempuannya. Di samping itu, para santri putra atau siapa pun yang laki-laki, dilarang berhubungan dengan santri putri dalam urusan apa pun tanpa membawa ijin dari kyai atau pengurus pesantren. Dengan demikian, kecil sekali peluang bagi para santri untuk saling bersosialisasi dengan teman-temannya yang berbeda jenis kelamin. Bahkan lebih jauh, kecil juga peluang bagi santri putri untuk bertemu dan berkomunikasi dengan kyainya yang acapkali berada di kompleks pesantren putra.

Kurikulum yang menjadi acuan dalam pembelajaran di pesantren tidak jarang juga tersegregasi antara santri laki-laki dan perempuan. Pengajaran pada santri putri lebih banyak diproyeksikan untuk mencetak perempuan-perempuan yang taat kepada suaminya dengan kepatuhan total. Kitab-kitab rujukan di pesantren seperti *Ihya Ulum al-Diin* karya Imam Al Ghazali, *Uqudullujain* karya Al-Nawawi, merupakan kitab wajib bagi para santri perempuan. Kitab-kitab tersebut, dan beberapa kitab ulama tradisional yang lain, memang tidak menempatkan perempuan sebagai the *second class*, tetapi juga tidak termasuk prioritas (Azra, 2006: 2).

Apa pun yang menjadi pertimbangan pengelola pesantren dan kyai yang memegang otoritas mutlak di pesantren dalam melakukan segregasi pendidikan, persoalan segregasi di pesantren sangat menarik untuk diteliti, mengingat fenomena segregasi pendidikan ini sangat umum —bahkan wajib— dilakukan oleh pengelola pondok pesantren. Geneologi segregasi pendidikan, bentuk-bentuk segregasi pendidikan di pesantren dan lebih jauh dampak segregasi bagi perilaku sosial santri di luar maupun di lingkungan pondok pesantren, menjadi fenomena yang patut diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan, dan mengambil judul Geneologi Segregasi Pendidikan Pondok Pesantren.

Pondok pesantren dari dulu merupakan subyek yang kaya dan mengundang banyak ketertarikan para peneliti baik dari dalam maupun luar negeri. Di antara beberapa peneliti dari luar negeri adalah Geertz (1963), yang melihat pesantren sebagai bagian dari proses modernisasi masyarakat Islam. Penelitian Geertz (1960-1981) yang lain lebih mengamati pesantren sebagai sumber terbentuknya varian santri dengan segala nilainya di dalam masyarakat Jawa. Selain Geertz, Caste (1966) seorang ahli sejarah, yang meneliti tentang pesantren Gontor, yang sudah menganut sistem klasikal dalam pembelajarannya. Penelitian sejarah pesantren juga dilakukan oleh Steenbrink (1974).

Sedangkan di antara peneliti dalam negeri, adalah Khozin (2003), yang meneliti fenomena pesantren pergerakan (salafi haraki) sebagaimana di PP. Al-Islam Tenggulun Lamongan. Juga Faiqoh (2003), yang meneliti peran Nyai sebagai agen perubahan di pesantren dengan mengambil subyek Pesantren al-Bidaiyah Pati, Jawa Tengah. Di samping itu, ada Nawangsari (2004). Penelitian Nawangsari menempatkan Nyai sebagai pemeran aktif dalam pendidikan pesantren. Penelitian yang secara khusus menelaah masalah segregasi dalam pendidikan pesantren tampaknya belum banyak dilakukan, walaupun segregasi merupakan fenomena lazim di pesantren

## PERUMUSAN MASALAH

Fokus penelitian ini adalah geneologi segregasi pendidikan yang menjadi kelaziman di lingkungan pesantren. Selanjutnya untuk lebih memfokuskan data, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah latar belakang dilakukannya segregasi pendidikan di pondok pesantren?
2. Bagaimana bentuk-bentuk segregasi pendidikan di pondok pesantren?
3. Bagaimana dampak segregasi pendidikan terhadap perilaku sosial santri di pesantren?

## TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk melacak geneologi segregasi pendidikan, yang menjadi kelaziman di lingkungan pesantren. Adapun tujuan yang lebih spesifik adalah:

1. Untuk melacak dasar pemikiran dilakukannya segregasi pendidikan di pesantren.
2. Untuk meneliti bentuk-bentuk segregasi pendidikan di pesantren.
3. Untuk menemukan dampak segregasi pendidikan terhadap perilaku sosial santri di pesantren.

## METODE PENELITIAN

### 1. Penentuan Fokus dan Desain Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini adalah fenomena segregasi pendidikan yang menjadi kebiasaan di lingkungan pondok pesantren. Peneliti ingin melacak geneologi segregasi pendidikan itu sendiri secara apa adanya. Oleh karena itu, digunakan penelitian dengan desain kualitatif (*qualitative design*). Selanjutnya, penelitian kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan fenomenologi, sehingga lebih banyak di tekankan pada upaya untuk menggali berbagai pertimbangan para pengelola pesantren dalam penerapan segregasi pendidikan yang multipersepsi. Selain itu, pengalaman santri yang merasakan model pendidikan terpisah juga akan ditampilkan apa adanya tanpa bermaksud membandingkan dengan model pembelajaran yang lain. Karena penelitian ini juga ingin melacak geneologi segregasi pendidikan pondok pesantren, maka perlu juga dipergunakan pendekatan historis untuk menemukan latar belakang sejarah dilakukannya segregasi itu sendiri.

## 2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Pondok Pesantren (PP.) As-Sunniah Kencong Jember, salah satu pesantren yang memiliki pengaruh besar di Jember, khususnya di wilayah Jember Selatan. Pemilihan PP. Assuniyah sebagai subyek penelitian didasarkan pada besarnya pengaruh KH. Ahmad Sadid Jauhari sebagai pendiri PP. Assuniyah, dan besarnya andil lembaga pendidikan pesantren itu sendiri terhadap pengembangan pondok pesantren lain yang berada di kawasan Jember Selatan. Selain itu, PP. Assuniyah telah banyak menghasilkan kyai pendiri pesantren, dan tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian mendirikan lembaga pendidikan dengan mengambil pola pendidikan sebagaimana PP. As Suniah.

Pertimbangan penting lainnya adalah kenyataan bahwa PP. As-Sunniah menerapkan pola pendidikan segregatif secara konsisten (baca: ketat). Latar belakang subyek tersebut sangat sesuai dengan fokus penelitian ini, yaitu tentang segregasi (pemisahan) dalam pendidikan. Walaupun tidak bisa dilakukan generalisasi dalam penelitian kualitatif, hasil penelitian di pondok pesantren As-Sunniah ini diharapkan bisa memberikan gambaran bagi fenomena segregasi pendidikan di pesantren lain yang ada di wilayah Jember, khususnya di Jember Selatan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dalam tiga tahap sebagaimana disarankan oleh Nasution (1988: 27). Tahapan-tahapan itu antara lain: pertama, tahap orientasi, eksplorasi, dan penelitian terfokus dengan berusaha menemukan jawaban-jawaban tentang dasar pemikiran dan bentuk-bentuk segregasi pendidikan di pesantren dan, lebih jauh lagi, tentang dampak segregasi itu terhadap perilaku santri. Guna menjangkau data penelitian, dilakukan secara serkuler tiga pendekatan, yaitu: (1) wawancara mendalam (*indept interviewing*), (2) pengamatan peran serta (*participan oservation*), dan (3) dokumentasi.

## 4. Penentuan Informan

Informan penelitian diambil dengan menggunakan sampling purposif (*purposive sampling*). Berdasarkan model sampling purposif, sampel diambil bukan bergantung pada populasi, melainkan bergantung pada tujuan penelitian. Adapun informan yang dimaksud adalah Kyai, pengurus yayasan, santri, masyarakat sekitar pondok pesantren, serta pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan pondok pesantren.

## 5. Teknik Analisis Data

Sebagai penelitian fenomenologis, analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif. Dengan demikian, peneliti akan berusaha menggali fenomena-fenomena yang terjadi di pesantren yang menjadi subyek penelitian, kemudian menghubungkan fenomena yang beragam itu untuk membangun suatu teori. Upaya untuk membangun teori baru itu dilakukan dengan mendialogkan fenomena lapangan dengan buku-buku literatur, sehingga pada saat yang sama analisis data juga bersifat deduktif. Oleh karena itu, peneliti banyak mengembangkan model berfikir refleksif (*reflective thinking*) dengan cara mengkompromikan data dengan kepustakaan dan begitu pula sebaliknya.

## 6. Pengujian Kredibilitas, Dependabilitas, dan Konfirmabilitas Data

Teknik pemeriksaan kredibilitas data yang digunakan antara lain melalui diskusi dengan teman sejawat (*peerdebriefing*). Selain itu, peneliti akan melakukan perpanjangan keikutsertaan yang juga didukung oleh ketekunan pengamatan. Agar data yang diperoleh lebih absah lagi, peneliti akan melakukan pengecekan ulang baik metode maupun sumber penelitian dengan triangulasi. Keseluruhan dari proses penelitian juga akan didukung dengan referensi yang mencukupi. Sedangkan pengujian dependabilitas dan konfirmabilitas data dilakukan dengan cara audit oleh dewan pakar

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Geneologi segregasi pendidikan di pesantren tidak bisa dikemukakan secara pasti, termasuk dalam hal ini di Pesantren As-Sunniah kencing Jember. Akan tetapi, kebanyakan pesantren di Indonesia mengambil pola pendidikan yang lebih mirip ribat, yang merupakan tempat pendidikan pada zaman dahulu. Ribat biasanya dihuni oleh orang-orang shufi (asketisme dalam Islam) agar memudahkan untuk suluk (ritual shufi) yang dibimbing langsung oleh para mursyid (guru)-nya (Umamah, 2002: 123). Tujuan pendirian Ribat ini semata-mata untuk menambah kedekatan dengan Allah dengan menghindari segala kesenangan dunia dalam bentuk apa pun. Ribat ini lazimnya didirikan khusus menurut jenis kelamin tertentu.

Kalau memang pesantren mengambil bentuk Ribat, maka wajar sekali bila pesantren menerapkan pola pendidikan secara terpisah. Terlepas dari itu kebanyakan pesantren di Jawa didirikan di lingkungan yang secara kultur patriarkhi (didominasi laki-laki). Misalnya, pesantren As-Sunniah didirikan oleh KH. Jauhari Zawawi yang sejak muda dibesarkan dalam lingkungan dengan dominasi laki-laki

dan menuntut ilmu di tempat-tempat yang menempatkan perempuan dan laki-laki secara terpisah. Dengan demikian, segregasi pendidikan di pesantren pada akhirnya sudah merupakan suatu kenyataan yang barangkali dianggap sebagai sebuah kewajaran atau bahkan keharusan bagi pesantren. Diskusi lebih jauh tentang latar belakang, bentuk-bentuk dan dampak segregasi pendidikan terhadap perilaku sosial santri di PP. Assunniah Kencong Jember adalah sebagai berikut:

### 1. Latar belakang dilakukannya segregasi pendidikan

Latar belakang dilakukannya segregasi pendidikan di Pesantren As-Sunniah adalah keyakinan adanya norma-norma yang sudah menjadi keharusan bagi pesantren untuk mengelola pendidikannya secara terpisah. Selain itu juga karena keinginan untuk mempertahankan identitas pesantren yang berbeda dengan pendidikan lainnya. Segregasi dilakukan juga dalam rangka menjaga pergaulan santri sehingga lebih mensucikan hati sebagai prasyarat keberhasilan seorang penuntut ilmu. Terakhir, segregasi pendidikan dilakukan karena perbedaan kemampuan santri berdasarkan fakta bahwa santri putra lebih cepat dalam penguasaan kitab ketimbang santri putri.

Melihat berbagai pertimbangan di atas, harus difahami bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia dengan sistem yang berbeda dengan pendidikan lainnya. Gus Dur (dalam Faiqoh, 2003: 55) menengarai ada beberapa hal berkenaan dengan pendidikan tradisional di pesantren. Pertama, pemberian pengajaran dengan struktur, metode, dan literatur pengajaran tradisional. Pemberian pengajaran tradisional ini bisa berupa pendidikan formal di sekolah/madrasah, maupun berupa pemberian pengajaran dengan metode halaqoh (*wetonan dan sorogan*). Ciri utama pendidikan tradisional ini, dilihat dari cara pemberian pengajarannya, hanya menekankan pada penangkapan harfiah (tekstual) atas kitab kuning. Kedua, pemeliharaan tata nilai tertentu, yang dikenal dengan subkultur. Tata nilai yang dimaksud terletak pada pelaksanaan proses belajar mengajar di pesantren yang menekankan kepada ibadah dan pengabdian kepada Allah serta memuliakan guru sebagai jalan untuk memperoleh pengetahuan agama yang hakiki. Tata nilai itu menciptakan tatanan sikap hidup yang universal. Sikap hidup berjiwa santri akan sangat positif, karena tidak menggantungkan hidupnya pada lembaga apa pun di luar pesantren.

Kemampuan mempertahankan subkulturnya dengan dunia di luar pesantren adalah suatu alternatif, karena pandangan santri kepada sikap hidup yang lebih mementingkan kehidupan *ukhrawi* merupakan penyeimbang bagi pandangan

hidup duniawi yang terjadi di masyarakat. Segregasi pendidikan termasuk subkultur yang harus dipertahankan oleh dunia pesantren, sebab bila pesantren mengikuti pola pendidikan sebagaimana lembaga lain, maka akan hilang identitas pesantren itu sendiri. KH. Ahmad Sadid Jauhari membuat perumpamaan antara lembaga pesantren dengan lembaga di luar pesantren sebagai berikut:

Kalau Allah diumpamakan pemilik perusahaan dunia, maka ada pabrik yang memproduksi barang berupa besi atau bahan bangunan yang tidak perlu dikemas secara rapi dan hati-hati, pengirimannya cukup dengan ditumpuk tanpa khawatir pecah atau rusak. Sementara ada perusahaan lain yang memproduksi barang pecah belah yang harus dirawat dan dikemas rapi, bahkan ketika berada dalam kemasan diberi tulisan 'Awas jangan dibanting', yang semakin menambah kehati-hatian dalam memperlakukan barang tersebut. Jika kemudian cara perlakuan terhadap barang-barang pecah belah menuntut disamakan dengan cara perlakuan terhadap besi, bukan kebaikan yang didapatkan, tetapi malah kerusakan yang fatal.

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang harus dikelola dengan hati-hati. Terlebih lagi, pesantren memiliki fungsi yang amat penting dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Zaini (1995: 103-106), yaitu sebagai lembaga dakwah, lembaga pengkaderan ulama, tempat pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama, dan sebagai lembaga pengembangan masyarakat. Berbagai fungsi di atas semakin menunjukkan bahwa pesantren merupakan lembaga yang tidak sekedar menciptakan manusia-manusia yang pandai, melainkan manusia pandai yang juga memiliki ketaqwaan kepada Allah. Untuk itu kebersihan hati harus senantiasa terpelihara agar tidak merusak kedekatan dengan Tuhan.

Pembelajaran model terpisah semata-mata adalah untuk menjaga hati santri baik laki-laki maupun perempuan agar terhindar dari pikiran-pikiran kotor. Memang banyak hadits dan doktrin-doktrin fiqhiyah yang memposisikan perempuan sebagai the second class yang menjadi santapan santri sehari-hari. Doktrin-doktrin fiqhiyah (hukum Islam) mengenai laki-laki dan perempuan yang dijadikan materi pelajaran wajib di pesantren mulai terumuskan secara lebih mapan oleh para fuqaha (ahli hukum) beberapa abad sepeninggal Nabi, tepatnya pada masa Abbasiyah. Pada saat itulah batas-batas tentang hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan terumuskan. Tidak bisa dipungkiri, pandangan masyarakat tentang perempuan dan gender pada waktu itu sangat berpengaruh pada perumusan hukum yang berlaku

kemudian.

Akan tetapi, alasan utama pemisahan pendidikan di pesantren bukan pandangan-pandangan hadits tersebut, sebab dalam lingkungan pesantren, pembatasan tidak hanya diberlakukan bagi santri perempuan melainkan juga bagi santri laki-laki dengan beberapa pengecualian. Akan halnya penjenjangan kelas antara laki-laki yang dibedakan dengan perempuan, begitu juga perbedaan tenggang waktu dalam penyelesaian kitab, apakah memang dikarenakan pernah dilakukan ujicoba kemudian gagal, atau karena terpengaruh oleh pandangan stereotype terhadap perempuan, yang memandang perempuan kurang akal nya dari pada laki-laki? Pertanyaan ini menjadi sulit untuk dijawab, sebab KH. Khoir Zat menunggingkan:

Tidak jelas kenapa kok terjadi perbedaan antara santri laki-laki dan perempuan dalam hal penguasaan kitab, yang jelas ketika pernah diuji cobakan selama satu tahun, target penguasaan kitab (dengan menghafal 500 bait dalam Kitab Alfiah) banyak santri perempuan yang keponthalan (kewalahan) sehingga target tidak bisa optimal. Akhirnya kita kembali kepada pola lama, yaitu perempuan cukup menghafal 300 bait dalam satu tahun, sedangkan laki-laki 500 bait.

Di sisi lain, pesantren sudah sangat akrab dengan pandangan bahwa perempuan memiliki kekurangan dalam hal akal dan agamanya, berdasarkan salah satu hadits riwayat Bukhori yang artinya sebagai berikut.

Dari Abu Said Al-Khudry r.a., ia berkata, "Rasulullah berangkat ke tempat sholat pada Idhul Adha atau Idhul Fitri dan berjumpa dengan para wanita. Beliau bersabda, "Wahai para wanita, adakah kamu membenarkan, aku beritahukan padamu kebanyakan kamu sekalian adalah ahli neraka". "Mengapa demikian Wahai Rosulullah?" Rasul menjawab, "Kamu sekalian banyak berbuat laknat (perbuatan yang dibenci) dan banyak ingkar terhadap jamaah (keras kepala). Aku tidak pernah melihat wanita yang kurang akal dan agamanya yang lebih mampu meluluhkan hati lelaki yang perkasa daripada salah seorang yang di antara kamu". Mereka bertanya, "Di mana letak kurang agama dan akal kami, ya Rasul?" Nabi bersabda, "Bukankah kesaksian seorang wanita itu setara dengan separo laki-laki?" Mereka berkata, "Betul!" Rasul bersabda, "Itulah letak kekurangan akal nya. Bukankah bila wanita sedang haid, mereka tidak sholat dan tidak puasa?" Mereka berkata, "Betul!" Rasul bersabda, "Begitulah kekurangan agamanya" (H.R. Bukhori).

Kembali pada persoalan pembedaan target pencapaian penguasaan kitab, tidak tertutup kemungkinan dikarenakan ujicoba dalam penyamaan terget tersebut kurang optimal akibat pandangan yang sudah tertanam dalam keyakinan pengelola pesantren tentang kekurangan akal perempuan. Khusus di Pesantren As-Sunniah, percobaan baru dilakukan selama satu tahun sehingga kurang representatif. Kondisi ini semakin diperparah dengan keyakinan diri santri perempuan sendiri tentang kelemahan dirinya —yang belum tentu benar— sehingga secara pribadi para santri sendiri kurang optimal dalam berusaha. Berbagai kemungkinan ini bisa saja terjadi.

## **2. Bentuk-bentuk segregasi pendidikan**

Bentuk-bentuk segregasi pendidikan di pesantren di PP. As-Sunniah antara lain dalam hal penyelenggaraan yang secara fisik terpisah, dalam hal pemilihan ustadz (pengajar) dan juga dalam hal kurikulum. Menjadi kewajaran (baca: kewajiban) bagi pesantren untuk menyelenggarakan pendidikan yang terpisah antara santri laki-laki dan perempuan. Asrama tempat tinggal para santri perempuan dipisahkan dengan asrama untuk santri putra, selain dipisahkan oleh rumah kyai dan keluarganya, juga oleh masjid dan ruang-ruang madrasah. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial antara santri laki-laki dengan santri perempuan, antara Nyai dengan santri laki-laki, antara kyai dengan santri perempuan diatur oleh norma-norma agama yang sangat ketat (Faiqoh, 2003: 33).

Pembelajaran juga tidak diselenggarakan dalam bentuk co-education (bergabung). Bahkan, beberapa pesantren mewajibkan pemasangan hijab bagi santri putri ketika diajar oleh guru laki-laki. Bagi santri perempuan, guru yang mengajar kebanyakan laki-laki. Penyelenggaraan pendidikan yang terpisah antara laki-laki dan perempuan acapkali berakibat pada berkurangnya kesempatan bagi santri putri untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang sama dengan laki-laki. Fenomena seperti ini juga tampak di Pesantren As-Sunniah, sebab hanya santri laki-laki yang memiliki tingkat pendidikan Aliyah, sementara santri putri tidak, dikarenakan mereka sudah menikah terlebih dahulu begitu lulus Tsanawiyah.

Sebagai akibat segregasi dalam materi yang diajarkan di pondok pesantren di atas, kecil sekali peluang bagi santri perempuan untuk bercita-cita menjadi kyai, tidak sebagaimana santri laki-laki. Kalau kemudian ada yang menjadi nyai (Kyai perempuan), hal itu semata-mata karena kebetulan dia anak seorang kyai atau karena dia beruntung dinikahi oleh kyai pengelola pesantren sehingga secara otomatis predikat nyai melekat dengan namanya (Faiqoh, 2003: 32). Menanggapi

hal ini, KH. Khoir Zat bertutur:

Kyai bukanlah gelar formal yang begitu saja diberikan kepada seseorang, meskipun orang itu telah menempuh pendidikan di pesantren. Pemberian gelar Kyai dilakukan oleh masyarakat, sebagai bentuk pengakuan masyarakat terhadap seseorang yang dipandang alim, dan bisa menjadi panutan masyarakat. Dengan demikian, Kyai atau bukan, masyarakat yang menentukan. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan kalau ada perempuan yang memiliki kemampuan yang dalam soal agama dan mendapat pengakuan dari masyarakat, dia kemudian menyandang gelar sebagai Nyai atau paling tidak diakui sebagai Nyai.

Apa pun pola dan bentuk segregasi di pesantren, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa para santri dan para pengelola tidak menganggapnya sebagai suatu hal yang patut dipersoalkan. Bagi mereka pola seperti di atas sudah menjadi pilihan yang terbaik. Para santri sendiri tidak pernah menuntut untuk mendapatkan perlakuan yang sama antara yang laki-laki dan perempuan. Kondisi ini sebagaimana diungkapkan oleh KH. Khoir Zat:

Saya kira para santri sudah cukup memahami aturan-aturan yang dijalankan di pesantren ini, sehingga mereka tidak pernah protes dan menuntut ini itu dalam kaitannya dengan peraturan di pesantren. Ketika mereka akan masuk ke PP. As-Sunniah mereka sudah mengetahui model pembelajaran di pondok ini sehingga begitu masuk mereka sudah siap. Sebenarnya yang memandang semua itu sebagai persoalan justru orang luar yang kurang atau bahkan tidak memahami realitas kehidupan di pesantren. Dengan demikian, upaya menyamakan persepsi akan menemui kesulitan.

Ungkapan Kyai di atas dibenarkan oleh beberapa santri yang sempat di mintai tanggapan tentang persoalan ini. Beberapa santri, di antaranya Nanang, Husnul, Hisyam dan lain-lain menuturkan:

Bagi kami, para santri di PP. As-Sunniah, peraturan-peraturan itu ditujukan kepada kami demi kebaikan kami sendiri. Kami yakin para Kyai memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri yang itu semua demi kebaikan dan keberhasilan kami. Bagi kami, menuntut ilmu harus diimbangi dengan kepatuhan kepada Kyai, sebab hanya dengan ketadlim-an kami kepada para kyai itulah, kami akan berhasil. Kami juga

tidak iri dengan teman-teman kami yang bersekolah di luar yang lebih bebas pergaulannya, sebab kalau pergaulan dibiarkan bebas tanpa ada peraturan-peraturan yang mengikat, justru akan banyak menimbulkan permasalahan sehingga akan mengganggu konsentrasi belajar.

### **3. Dampak Segregasi Pendidikan**

Dampak segregasi pendidikan dalam kenyataan lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Dengan pemisahan itu, santri merasa lebih konsentrasi dalam menuntut ilmu, sehingga ketika mereka keluar dari lingkungan pesantren akan lebih mudah dalam beradaptasi. Kalaupun ada santri yang begitu keluar dari pesantren semakin jauh dari nilai-nilai yang telah mereka yakini sebelumnya, biasanya terjadi pada santri yang tidak tuntas menuntut ilmu di pesantren. Dengan demikian, pada dasarnya penyelenggaraan pendidikan dengan terpisah tidak mesti menimbulkan keterbatasan akses anak didik untuk memperoleh pengetahuan. Bila sekolah yang terpisah itu mendapatkan perlakuan yang sama besar, kemungkinan akan menghasilkan peserta didik dengan kualitas yang lebih baik dari pada dengan model co-edukasi. Kenyataan ini sebagaimana diungkapkan oleh KH. Khoir Zat<sup>11</sup>

Memang kami menyelenggarakan pendidikan dengan model terpisah, tetapi kalau kemudian pembelajaran dengan model ini dianggap bisa menghambat santri putri untuk memperoleh pengetahuan tidak sepenuhnya benar. Para santri mendapatkan materi yang sama, mediasi yang sama, dan perlakuan yang sama hanya tempat penyelenggaraannya yang berbeda. Adapun pembelajaran bagi santri putri yang diparalelkan dengan pengeras suara adalah untuk pelajaran kitab dengan model Bandongan yang dilakukan Kyai dengan membacakan kitab-kitab tertentu, sementara santri cukup mendengarkan pembacaan kitab tersebut, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan akan diberikan waktu khusus di madrasah.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa geneologi segregasi pendidikan di pesantren sebenarnya tidak bisa ditentukan secara pasti. Khusus di Pesantren As-Sunniah, kebijakan segregasi pendidikan lebih banyak dipengaruhi oleh latar belakang lingkungan tempat KH Jauhari Zawawi hidup dan menjalani kehidupan, serta pengaruh pesantren-pesantren tempat KH Jauhari Zawawi menuntut ilmu yang kebanyakan murni salaf.

Adapun secara khusus, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang dilakukannya segregasi pendidikan di Pesantren As-Sunniah adalah adanya norma-norma yang sudah menjadi keharusan bahkan keyakinan bagi pesantren untuk mengelola pendidikannya secara terpisah. Selain itu juga karena keinginan untuk mempertahankan identitas pesantren yang berbeda dengan pendidikan lainnya. Segregasi dilakukan juga dalam rangka menjaga pergaulan santri sehingga lebih mensucikan hati sebagai prasyarat keberhasilan seorang penuntut ilmu. Terakhir, segregasi pendidikan dilakukan karena perbedaan kemampuan santri, sebab ditemukan fakta bahwa santri putra lebih cepat dalam penguasaan kitab ketimbang santri putri.
2. Bentuk-bentuk segregasi pendidikan di pesantren antara lain dalam hal penyelenggaraan yang secara fisik terpisah, dalam hal pemilihan ustadz (pengajar) dan juga dalam hal kurikulum.
3. Dampak segregasi pendidikan dalam kenyataan lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Dengan pemisahan itu, santri merasa lebih konsentrasi dalam menuntut ilmu, sehingga ketika mereka keluar dari lingkungan pesantren akan lebih mudah dalam beradaptasi. Kalaupun ada santri yang begitu keluar dari pesantren semakin jauh dari nilai-nilai yang telah mereka yakini sebelumnya, biasanya terjadi pada santri yang tidak tuntas menuntut ilmu di pesantren.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Leila. 2000. *Wanita dan Gender dalam Islam Akar-akar Historis Perdebatan Moderen*. Jakarta: Lentera
- An Nawawi, Syikh Muhammad bin Umar. Tt. *'Uqud al-Jain Fi Bayan al-Huququ al-Zaujain*. Indonesia: Darul Ihya'
- As Suyuthi, Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abu Bakar. Tt. *Al Jami' Al-Shaghir*. Beirut: Darul Fikr.
- Azra, Azyumardi. 2004. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Bogdan, R.C., and Biklen, S.K. 1982. *Qualitative Research for Education an Introduction to Theori and Methods*. London: Allyn and Bacon. Inc.

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Departemen Agama RI. 1989. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: DEPAG RI.

Faiqoh. *Nyai Agen Perubahan di Pesantren*. 2003. Jakarta: Kucica.

Soebahar, Abdul Halim. 2002. *Wawasan Baru Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.